

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR



RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH	9
2.1. Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025.....	10
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setda s/d Triwulan I Tahun 2025	11
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH ...	31
BAB IV PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	10
Tabel 2.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025.....	11
Tabel 3.1.	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025	50

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan ini pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang ditetapkan untuk kurun waktu satu tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Sekretariat Daerah sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai selama tahun 2025 setelah evaluasi semester Pertama, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten akan sangat kami hargai.

Demikianlah Perubahan Rencana kerja ini kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Cibinong, 16 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,



AJAT ROCHMAT JATNIKA, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
197109071999011001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, didasari atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja mengacu pada kerangka kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD. Renja dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (Permendagri 86/2017, pasal 343) meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau
- b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, RKPD dan RENJA Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodir kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat yang belum terfasilitasi dalam RENJA Murni tahun 2025, secara lebih luas dapat disimpulkan beberapa alasan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yaitu :

- a. Adanya penyesuaian belanja berdasarkan hasil realokasi pada perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025.
- b. Adanya penyesuaian kinerja perangkat daerah berdasarkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati definitif periode tahun 2025-2030.
- c. Adanya kebutuhan belanja perangkat daerah yang ditujukan untuk mencapai kinerja utama dan kinerja kunci.

Seluruh perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dilakukan tetap dengan memperhatikan efisiensi yang ditetapkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sekretariat Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor terdiri atas 3 Asisten, di mana masing-masing Asisten terdiri dari 4 bagian dan setiap bagian membawahi jabatan manajerial, fungsional dan pelaksana. Rencana Kerja Perubahan adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk tahun 2025 yang disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 dengan menyesuaikan kondisi terkini sesuai dengan dan mengakomodir kebutuhan yang belum terselesaikan di tahun 2024, dan selanjutnya dokumen perubahan perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam menyelesaikan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Perubahan Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah yang kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bogor.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Perubahan Rencana Kerja yang mendasari penyusunan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14); dan
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 46).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Perubahan RAPBD tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah:

- a. Mencatat perubahan yang terjadi dalam perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025 ke dalam perubahan Renja PD tahun 2025;
- b. Menyesuaikan kinerja, indikator dan target kinerja perangkat daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk tahun 2025;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah dan Perubahan APBD tahun anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 361 ayat 3 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab ini, sub bab dan substansi yang wajib ada adalah :

1.1. Latar Belakang

- a. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD Tahun 2025 dan alasan perubahannya. Adapun alasan perubahan, yaitu :
 1. Adanya penyesuaian belanja berdasarkan hasil realokasi pada perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025.
 2. Adanya penyesuaian kinerja perangkat daerah berdasarkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati definitif periode tahun 2025-2030.
 3. Adanya kebutuhan belanja perangkat daerah yang ditujukan untuk mencapai kinerja utama dan kinerja kunci.

Seluruh perubahan dilakukan tetap dengan memperhatikan efisiensi yang ditetapkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- b. Mengemukakan proses penyusunan perubahan Renja, menjelaskan secara singkat dan mencantumkan tahapan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah mulai dari

penyusunan Rancangan Renja sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah.

- c. Mengemukakan keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD tahun 2025.
- d. Mengemukakan keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang sedang disusun, dimana data pada Perubahan Renja PD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Renstra PD untuk tahun 2025.
- e. Mengemukakan keterkaitan antara Perubahan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga, dan Perubahan Renja Provinsi Jabar.
- f. Tindak lanjut Perubahan Renja PD dalam tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dan menjabarkan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi Renja. Adapun landasan hukum yang wajib dicantumkan adalah aturan tentang :

1. pembentukan Kabupaten Bogor
2. pembentukan SOTK perangkat daerah
3. rencana tata ruang dan wilayah
4. perencanaan dan dokumen perencanaan, baik nasional, Jawa Barat maupun Kabupaten Bogor
5. aturan lainnya yang terkait

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

Maksud :

Maksud disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Perubahan RAPBD tahun 2025.

Tujuan :

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah :

1. Mencatat perubahan yang terjadi dalam perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025 ke dalam perubahan Renja PD tahun 2025;
2. Menyesuaikan kinerja, indikator dan target kinerja perangkat daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk tahun 2025.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah dan Perubahan APBD tahun anggaran 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Renja Perangkat Daerah, diuraikan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 361 ayat (3) sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV : Penutup

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TH 2025

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, serta dituangkan pada tabel 2.1 dan table 2.2 (format terlampir). Adapun substansi Tabel 2.2 memedomani Buku II Perubahan RKPD Tahun 2025.

Beberapa catatan penting terkait penyusunan substansi Bab II, yaitu : Substansi Tabel 2.1 adalah menguraikan kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tujuan dan sasaran.

Untuk evaluasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 diwajibkan untuk memedomani hasil evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025, dengan masih menggunakan kinerja dan indikator kinerja yang tercantum dalam Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan telah dilakukan penyesuaian kinerja perangkat daerah dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029, kinerja tujuan dan sasaran, indikator serta target Rencana Kerja Tahun 2025 secara simultan mengikuti

Renstra PD tahun 2025-2029, yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan dan menguraikan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 yang terdapat dalam Tabel 3.1 berdasarkan :

1. Hasil perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025, dimana perubahan dimaksud mengakomodir a) ketentuan efisiensi dan realokasi anggaran belanja perangkat daerah tahun 2025. b) dana transfer yang masuk ke dalam Perubahan APBD untuk mendanai kegiatan perangkat daerah yang sudah ditentukan dari pemberi dana transfer. Acuan ini memedomani Perubahan RKPD Tahun 2025 yang dituangkan pada dalam Buku III Perubahan RKPD Tahun 2025.
2. Rencana kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam usulan perubahan Renja PD untuk mendanai pencapaian kinerja PD, baik sebagai upaya tindak lanjut pelaksanaan visi, misi dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati, serta usulan untuk mencapai kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan konkuren yang akan terdampak jika tidak dialokasikan sejumlah anggaran tertentu.

Pengusulan ini tetap memedomani kriteria efisiensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian pada tahapan selanjutnya pasca penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2025. Bab Penutup ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB II

Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan I dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor melalui analisis terhadap dua aspek utama, yaitu kinerja output dan kinerja keuangan. Kinerja output mencerminkan tingkat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat Daerah, sedangkan kinerja keuangan menunjukkan seberapa besar pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran output yang telah direncanakan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi umum, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas tiga Asisten, di mana masing-masing Asisten membawahi empat Bagian. Setiap Bagian tersebut kemudian membawahi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional yang sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yaitu ***“Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”*** dengan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor berupa ***“Tercapainya target pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah”***.

Namun, pada triwulan I Tahun 2025, persentase capaian indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah masih sebesar 0%. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang diselaraskan kembali dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Sedangkan Realisasi anggaran

Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 mencapai sebesar Rp33.410.580.774,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan administrasi pemerintahan serta pelayanan umum yang menjadi bagian dari tugas pokok Sekretariat Daerah. Data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor untuk Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target RENSTRA Tahun 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8
1	Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Akuntabel	Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik	%	100	-	-	Penyesuaian Tujuan PD
	Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda	%	100	-	-	Penyesuaian Sasaran PD

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I melaksanakan 3 Program, 20 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp175.673.554.380,00 dengan realisasi sebesar Rp33.410.580.774,00 Adapun rincian realisasi anggaran belanja program kegiatan, dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut

Table 2.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra tahun 2030)		Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket	
				Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
4	01																			
4	01	01																		Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230
																				Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230
																				Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230
																				Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230
																				Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230

						Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum	%	100		100		100										Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230
4	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100	602,650,428		458,566,752	100	618,047,982	11.11	121,186,014	11.11%	19.61%	11	579,752,766		0.96	
4	01	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	276,000,520		127,611,368	6	186,869,148.00	1	65,792,422	0.17	35.21%	7	193,403,790		0.70	
4	01	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	69,754,381		61,426,800	1	91,982,900.00	-	28,507,300	-	30.99%	1	89,934,100		1.29	
4	01	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	26,098,672		29,588,300	1	31,899,525.00	-	-	-	-	1	29,588,300		1.13	
4	01	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	41,128,082		46,975,000	1	50,044,125.00	-	18,768,625	-	37.50%	1	65,743,625		1.60	
4	01	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	29,103,942		31,378,500	1	34,221,625.00	-	-	-	-	1	31,378,500		1.08	
4	01	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	100,749,628		103,164,284	3	108,636,959.00	1	8,117,667	0.33	7.47%	4	111,281,951		1.10	
4	01	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	48,436,336		58,422,500	4	59,399,200.00	-	-	-	-	4	58,422,500		1.21	
4	01	01	2	08	Penyelenggaraan WaliData Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	11,378,866			1	54,994,500.00	-	-	-	-	-	-		-	
4	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Sekretariat Daerah	%	100	67,888,886,846		55,071,722,380	100	58,325,886,303	93	12,168,922,438	92.71%	20.86%	193	67,240,644,818		0.99	

4	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	300	67,325,242,242	224	54,620,244,010	224	57,794,245,484	224	11,986,098,592	1	20.74%	448	66,606,342,602	0.99			
4	01	01	2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	292,578,286	2	242,065,318	2	264,431,727	2	152,988,512	1	57.86%	4	395,053,830	1.35			
4	01	01	2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	43,118,673	2	54,829,384	2	52,199,065	-	-	-	-	2	54,829,384	1.27			
4	01	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	76,767,030	1	83,323,268	1	112,459,359	-	15,335,334	-	13.64%	1	98,658,602	1.29			
4	01	01	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	122,523,242	16	35,334,800	16	34,719,125	-	-	-	-	16	35,334,800	0.29			
4	01	01	2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	28,657,373	1	35,925,600	2	67,831,543	3	14,500,000	1.5	21.38%	4	50,425,600	1.76			
4	01	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100 (100)	17,447,939		18,539,100	100	21,397,415	-	-	-	-	-	18,539,100	1.06			
4	01	01	2	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Sekretariat Daerah	Dokumen	1	1,127,801	1	1,247,700	1	1,383,060	-	-	-	-	1	1,247,700	1.11			
4	01	01	2	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Laporan	1	2,161,467	1	2,385,300	1	2,650,680	-	-	-	-	1	2,385,300	1.10			
4	01	01	2	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	14,158,671	1	14,906,100	1	17,363,675	-	-	-	-	1	14,906,100	1.05			
4	01	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	3,226,143,403		1,834,389,131	100	2,775,198,319	60	1,471,011,001	60%	53.01%	60	3,305,400,132	1.02			
4	01	01	2	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	914,187,093	12	353,824,750	12	788,627,908	-	153,388,500	-	19.45%	12	507,213,250	0.55			

4	01	01	2	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	225,977,218	6	183,106,083	6	195,896,011	-	25,486,501	-	13.01%	6	208,592,584	0.92				
4	01	01	2	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	326,961,133	1	288,335,850	1	280,674,400	-	3,376,000	-	1.2%	1	291,711,850	0.89				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Asesment Pegawai Lingkup Sekretariat Daerah	Laporan	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	01	01	2	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	1,759,017,960	201	1,009,122,448	30	1,510,000,000	30	1,288,760,000	1.00	85.35%	231	2,297,882,448	1.31				
4	01	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100	41,517,096,649		15,132,663,318	100	15,527,087,259	10	2,773,959,371	9.64%	17.87%	10	17,906,622,689	0.43				
4	01	01	2	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	530,898,936	6	294,675,250	6	238,813,421	6	220,540,350	1	92.35%	12	515,215,600	0.97				
4	01	01	2	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	19,629,998,417	15	5,528,122,918	15	5,387,278,663	1	273,320,921	0.07	5.07%	16	5,801,443,839	0.30				
4	01	01	2	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	3,988,829,155	4	3,125,704,400	4	2,974,552,674	1	531,448,100	0.25	17.87%	5	3,657,152,500	0.92				
4	01	01	2	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	247,323,982	45	283,605,250	45	125,289,571	-	-	-	-	45	283,605,250	1.15				
4	01	01	2	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Bulanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	16,781,080,333	1	5,631,722,125	12	6,500,028,030	-	1,609,230,000	-	24.76%	1	7,240,952,125	0.43				
4	01	01	2	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Digitalisasi Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	338,965,826	1	268,833,375	1	301,124,900	-	139,420,000	-	46.30%	1	408,253,375	1.20				
4	01	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	2,881,209,523		1,737,111,599	100	2,558,140,510	17	191,598,873	16.67%	7.49%	17	1,928,710,472	0.67				
4	01	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2,881,209,523	3	1,737,111,599	12	2,558,140,510	2	191,598,873	0.17	7.49%	5	1,928,710,472	0.67				

4	01	01	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan dengan baik	%	100	1,996,187,712	1,375,700,000	100	4,556,319,780	-	-	-	-	-	1,375,700,000	0.69			
4	01	01	2	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	1,996,187,712	3	1,375,700,000	3	4,556,319,780	-	-	-	-	3	1,375,700,000	0.69		
4	01	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	15,131,413,862	10,607,264,174	100	13,299,409,301	55	2,084,482,567	55%	15.67%	55	12,691,746,741	0.84			
4	01	01	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2,146,783,566	2	1,862,530,790	2	1,986,821,944	2	574,750,205	1	28.93%	4	2,437,280,995	1.14		
4	01	01	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Internet, Layanan Selular, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	5,192,873,771	4	3,998,154,908	4	5,117,738,056	4	670,251,438	1	13.10%	8	4,668,406,346	0.90		
4	01	01	2	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,679,319,301	1	1,380,151,034	1	1,735,608,677	-	28,853,001	-	1.66%	1	1,409,004,035	0.84		
4	01	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	6,112,437,223	4	3,366,427,442	4	4,459,240,624	-	810,627,923	-	18.18%	4	4,177,055,365	0.68		
4	01	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100	13,496,677,530	6,839,521,366	100	6,761,121,851	4	131,427,730	4%	1.94%	4	6,970,949,096	0.52			
4	01	01	2	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	831,619,425	6	296,303,463	6	644,370,000	-	44,958,989	-	6.98%	6	341,262,452	0.41		
4	01	01	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	256	1,333,224,947	256	657,538,503	256	919,500,000	12	86,468,741	0.05	9.4%	268	744,007,244	0.56		
4	01	01	2	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	69,894,753	5	110,889,000	5	90,000,000	-	-	-	0%	5	110,889,000	1.59		
4	01	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	9,860,920,293	1	5,774,790,400	1	5,107,251,851	-	-	-	0%	1	5,774,790,400	0.59		

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,401,018,112	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	-	Penambahan Sub Kegiatan Baru	
4	01	01	2		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Medical Check Up Kepala Daerah yang Dilakukan	%	100	279,579,013	-	100	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
4	01	01	2	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	279,579,013	-	2	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
4	01	01	2		Fasilitasi Kerumahahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Layanan Kerumahahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terpenuhi	%	100	6,207,672,312	1,260,387,425	100	5,079,563,224	25	955,634,424	0.25	18.81%	25	2,216,021,849	0.36		
4	01	01	2	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	2,768,658,520	12	996,721,225	12	2,376,735,449	3	536,937,078	0.25	22.59%	15	1,533,658,303	0.55	
4	01	01	2	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	12	2,261,961,851	-	-	12	1,941,770,140	3	380,054,694	0.25	19.57%	3	380,054,694	0.17	
4	01	01	2	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	1,177,051,940	9	263,666,200	12	761,057,635	3	38,642,652	0.25	5.08%	12	302,308,852	0.26	
4	01	01	2		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Gaji, Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu	%	100	12,673,403,147	5,740,316,726	100	8,704,202,050	10	1,707,784,662	10.42%	19.62%	10	7,448,101,388	0.59		
4	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	24	1,841,935,243	12	756,307,300	24	1,581,178,976	2	11,585,799	0.08	0.73%	14	767,893,099	0.42	
4	01	01	2	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	24	10,831,467,905	12	4,984,009,426	24	7,123,023,074	3	1,696,198,863	0.13	23.81%	15	6,680,208,289	0.62	
4	01	01	2		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	100	700,461,920	267,050,000	100	435,000,000	4	181,480,000	4%	41.72%	4	448,530,000	0.64		
4	01	01	2	02	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	700,461,920	6	267,050,000	100	435,000,000	4	181,480,000	0.04	41.72%	10	448,530,000	0.64	

4	01	01	2		Penataan Organisasi	Kategori Penerapan Sistem Kerja Berdasarkan SE Menpan No 15 Tahun 2023	Kategori	6.5	-	-	4	-	-	-	N/A	-	-	N/A	
4	01	01	2	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah rancangan Perbup/Kepbup/SE Implementasi Sistem Kerja 2025	Dokumen	1	-	-	1	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	
						Laporan Hasil FGD/Sharing Session	Dokumen	1	-	-	1	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	
						Telaahan Staff sebagai bahan perumusan kebijakan Sistem Kerja Tahun 2026	Dokumen	1	-	-	1	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	
4	01	01	2		Penataan Organisasi	Persentase kematangan kelembagaan PD pada level sangat tinggi	%	85	-	-	35	-	-	-	N/A	-	-	N/A	
						Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi dan asistensi/konseling kelembagaan	Perangkat Daerah	76	-	-	76	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	
						Laporan Hasil Evaluasi Kematangan Kelembagaan kepada PPK dan kepada Kemendagri	Dokumen	1	-	-	1	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	
4	01	01	2		Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup organisasi	%	100	300,795,216	325,559,850	100	425,000,000	-	5,747,000	-	1.35%	-	331,306,850	1.10
4	01	01	2	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan berupa Kepbup/Perbup Kelembagaan)	Dokumen	20	300,795,216	20 325,559,850	20	425,000,000	-	5,747,000	-	1.35%	32	331,306,850	1.10
						Jumlah Dokumen Kajian dan Naskah Akademik Kelembagaan yang tersusun	Dokumen	2	-	-	2	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	
4	01	01	2		Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	%	100	-	-	100	-	-	-	N/A	-	-	N/A	

4	01	01	2	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah fasilitasi kepegawaian yang terpenuhi sesuai kebutuhan manajemen SDM	Kegiatan	3	-	-	-	3	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Jumlah Kebutuhan/Formasi JF yang tersusun sesuai pedoman perhitungan kebutuhan JF	Jenis JF	10	-	-	-	10	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Jumlah Kebutuhan JF yang diusulkan penetapannya ke Kementerian PAN dan RB	Jenis JF	3	-	-	-	3	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Jumlah dokumen laporan pengembangan sistem informasi jabatan yang terintegrasi	Dokumen	1	-	-	-	1	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
4	01	01	2		Penataan Organisasi	Persentase koordinasi, fasilitasi serta sosialisasi tata laksana	%	100	124,841,087		133,952,175	100	189,503,650	-	-	-	-	-	133,952,175	1.07		
4	01	01	2	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah kebijakan berupa Kepbup dan SE terkait pengaturan tata laksana secara efektif dan efisien.	Dokumen	5	-	-	-	5	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Rancangan Kepbup Peta Bisnis Proses sesuai RPJMD Kabupaten Bogor 2025-2029	Dokumen	1	-	-	-	1	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Jumlah pelaksanaan sosialisasi Tata Laksana	Dokumen	1	-	-	-	1	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	3	124,841,087	3	133,952,175	3	189,503,650	-	-	-	0.00%	3	133,952,175	1.07		
						Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunannya	Jenis SOP	5	-	-	-	5	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Jumlah SOP PD yang dievaluasi	PD	76	-	-	-	76	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Rumusan Kebijakan Fleksibilitas Kerja	Dokumen	1	-	-	-	1	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
4	01	01	2		Penataan Organisasi	Tingkat Capaian RB Perangkat Daerah minimal Baik	%	79.16	137,334,570		421,853,600	19.44	207,871,975	-	1,800,000	-	0.87%	-	423,653,600	3.08		

4	01	01	2	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Jumlah Kepbup Renaksi RB)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Jumlah Kepbup Renaksi RB)	Dokumen	2	137,334,570	1	421,853,600	2	207,871,975	-	1,800,000	-	0.87%	1	423,653,600	3.08		
						Jumah Capaian Monev Implementasi Renaksi RB yang terkoordinasi dan terinput dalam Portal RB Menpan	Kegiatan	4	-	-	-	4	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Jumlah pelaksanaan Roadshow RB	Perangkat Daerah	8	-	-	-	8	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Jumlah Sosialisasi/FGD Mindset Reform Level Pimpinan JPT dan Administrator	Kegiatan	2	-	-	-	2	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Jumlah Koordinasi dan Konsultasi tema keorganisasian melalui "Warung Nasi"	Kegiatan	8	-	-	-	8	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Jumlah Sosialisasi/Fasilitasi PD dan Evaluator dalam penilaian RB PD (sosialisasi ke PD 1, pleno kab 2, pleno prop 2)	Kegiatan	5	-	-	-	5	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Dokumen Laporan Sementara dan Keputusan Final Hasil evaluasi RB PD	Dokumen	2	-	-	-	2	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
									-	-	-		-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
4	01	01	2		Penataan Organisasi	Persentase Koordinasi, fasilitasi serta sosialisasi pelayanan publik	%	100	148,521,866		182,194,050	100	213,172,075	-	-	-	-	-	182,194,050	100		
4	01	01	2	04	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (PEKPP, KPP dan IKM semester 1 dan 2/tahunan)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (PEKPP, KPP dan IKM semester 1 dan 2/tahunan)	Dokumen	4	148,521,866	3	182,194,050	4	213,172,075	-	-	-	-	3	182,194,050	1.23		
						Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis ZI bagi TPI dan PD Target	Kegiatan	2	-	-	-	2	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Jumlah dokumen laporan pembangunan Zona Integritas	Dokumen	1	-	-	-	1	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		

						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Akun Media Sosial dan Media Online	Laporan	12	-	-	-	12	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A			
4	01	02				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	AA	40,847,705,238	AA	31,947,650,721	AA	36,945,731,104	-	9,712,877,686	N/A	26.29%	N/A	41,660,528,407	-	1.02	Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230
						Persentase Pengkoordinasian dan Evaluasi terhadap Ketercapaian Isu Tematik Prioritas Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	%	100		100		100										Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230	
						Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100		100		100										Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230	
						Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100		100		100										Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230	
4	01	02	2			Administrasi Tata Pemerintahan	Rata-rata Penerapan SPM Kabupaten Bogor	%	98,50	343,371,319		1,165,720,061	98.5	453,284,270	-	109,033,900	-	24.05%		1,274,753,961		3.71	
4	01	02	2	01		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Fasilitas dan Pendampingan Penerapan SPM Kabupaten Bogor	Pendampingan	5	343,371,319	5	1,165,720,061	5	453,284,270	-	109,033,900	-	24.05%	5	1,274,753,961		3.71	
4	01	02	2			Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Tata Pemerintahan	%	100	912,968,502		1,661,630,116	100	1,277,863,933	-	308,029,384	-	24.11%		1,969,659,500		2.16	
4	01	02	2	01		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	5	-	-	-	5	-	-	-	N/A	N/A	-	-		N/A	
4	01	02	2	02		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	-	-	-	3	-	-	-	N/A	N/A	-	-		N/A	
						Jumlah Kunjungan Kepala Daerah ke Kecamatan	Kunjungan	30	-	-	-	30	-	-	-	N/A	N/A	-	-		N/A		

						Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Bantuan Infrastruktur Kelurahan	Dokumen	12	509,847,456	3	813,693,982	12	741,123,309	-	147,729,667	-	19.93%	3	961,423,649	1.89			
4	01	02	2	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	403,121,047	1	847,936,134	3	536,740,624	-	160,299,717	-	29.87%	1	1,008,235,851	2.50			
						Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kapasitas Daerah	Dokumen	1	-	-	-	1	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A			
						Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Dokumen	1	-	-	-	1	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A			
4	01	02	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Rakyat	%	100	36,609,296,209		25,757,906,487	100	31,926,104,948	-	8,514,783,085	-	26.67%	-	34,272,689,572	0.94			
4	01	02	2	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5	12,043,797,198	1	9,704,535,496	5	11,576,825,636	-	562,445,009	-	4.86%	1	10,266,980,505	0.85			
4	01	02	2	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen	6	20,159,331,313	5	14,296,827,809	4	17,519,268,193	-	7,856,443,584	-	44.84%	5	22,153,271,393	1.10			
4	01	02	2	03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	5	4,406,167,698	6	1,756,543,182	2	2,830,011,119	-	95,894,492	-	3.39%	6	1,852,437,674	0.42			
						Jumlah Pengkoordinasian Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	4	-	-	-	1	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A			
						Jumlah Kegiatan Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	3	-	-	-	3	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A			
4	01	02	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hibah Keagamaan	%	100	-		-	100	-	-	-	-	N/A	-	-	N/A			
4	01	02	2	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Laporan Penyelenggaraan Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan	Laporan	160	-	-	-	181	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A			
4	01	02	2	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Laporan Penyelenggaraan Hibah Lembaga Keagamaan	Laporan	8	-	-	-	10	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A			

4	01	02	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Prevalensi Stunting Kabupaten Bogor	%	100	-	-	100	-	-	-	N/A	-	-	-	N/A	-	-	
4	01	02	2	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Prevalensi Stunting	Laporan	4	-	-	4	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	-	-
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tingkat Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi	Poin	>22.5	-	-	>22.5	-	-	-	N/A	-	-	-	N/A	-	-	
4	01	02	2	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Di Harmonisasi	Dokumen	15	-	-	15	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	-	-
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat yang Berkualitas	Poin	>22.5	-	-	>22.5	-	-	-	N/A	-	-	-	N/A	-	-	
4	01	02	2	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Asn Yang Mendapat Peningkatan Kompetensi Dibidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12	-	-	2	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	-	-
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Hasil Reviu	Poin	>27	-	-	>27	-	-	-	N/A	-	-	-	N/A	-	-	
4	01	02	2	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan di Reregulasi dan Deregulasi Sebagai Tindak Lanjut dari Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Dokumen	2	-	-	2	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	-	-
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	Poin	>18	-	-	>18	-	-	-	N/A	-	-	-	N/A	-	-	
4	01	02	2	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Jdih Terintegrasi Sesuai Dengan Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum	Dokumen	1	-	-	1	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	-	-
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan sesuai Program Pembentukan Peraturan Bupati Peraturan Daerah	%	100	1,494,508,725	2,135,823,671	100	1,965,291,503	10	595,226,567	0.10	30.29%	10	2,731,050,238	1.83	-	-	
4	01	02	2	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	395	987,167,267	892	1,467,926,334	395	1,315,966,234	63	468,324,104	0.16	35.59%	955	1,936,250,438	1.96	-	-

4	01	02	2	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	395	507,341,457	898	667,897,337	395	649,325,269	15	126,902,463	0.04	19.54%	913	794,799,800	1.57		
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Perkara yang Ditangani	%	100	1,026,444,695		933,619,886	100	727,104,825	-	105,437,475	-	14.50%	-	1,039,057,361	1.01		
4	01	02	2	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus	35	1,026,444,695	36	933,619,886	35	727,104,825	-	105,437,475	-	14.50%	36	1,039,057,361	1.01		
						Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan	20	-	-	-	20	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
						Jumlah Penyuluhan Hukum Aparatur	Penyuluhan	1	-	-	-	1	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Ketercapaian Target Rencana Aksi Nasional HAM	%	100	-	-	-	100	-	-	-	N/A	-	-	-	N/A		
4	01	02	2	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Penyampaian Bukti Dukung Pemenuhan Rencana Aksi	Bukti Dukung	3	-	-	-	6	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
4	01	02	2		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Implementasi Kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang disepakati	%	80	461,115,788		292,950,500	80	596,081,625	-	80,367,275	-	13.48%	-	373,317,775	0.81		
4	01	02	2	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	110	274,749,060	340	219,130,000	110	213,362,550	-	66,298,000	-	31.07%	340	285,428,000	1.04		
4	01	02	2	02	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	12	105,849,280	25	73,820,500	12	82,719,075	-	14,069,275	-	17.01%	25	87,889,775	0.83		
4	01	02	2	03	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	80,517,447	-	-	1	300,000,000	-	-	-	0.00%	-	-	0.00		
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Indek Tata Kelola Pengadaan	Poin	84	11,271,108,625	83,35	11,489,623,446	79	10,585,520,163	-	926,432,238	-	8.75%	N/A	12,416,055,684	-	1.10	Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230
						Persentase Pengkoordinasian dan Evaluasi terhadap Ketercapaian Isu Tematik Prioritas Bidang	%	100		100		100										Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor

						Perekonomian dan Pembangunan																Tahun 2025 - 20230
						Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100		100												Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230
						Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100		100												Indikator Program baru yang di usulkan pada RPJMD Setda Kab Bogor Tahun 2025 - 20230
4	01	03	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang perekonomian	%	100	2,049,068,605		905,132,676	100	642,115,750	-	14,576,450	-	2.27%	-		919,709,126	0.45	
4	01	03	2	01	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	2,049,068,605	1	905,132,676	1	642,115,750	-	14,576,450	-	2.27%	1		919,709,126	0.45	
4	01	03	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan koordinasi terkait pengendalian inflasi kabupaten Bogor	%	100	195,528,592		379,378,050	100	255,112,450	-	29,236,150	-	11.46%	-		408,614,200	2.09	
4	01	03	2	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Terkait Inflasi Kabupaten Bogor	Laporan	12	195,528,592	1	379,378,050	12	255,112,450	-	29,236,150	-	11.46%	1		408,614,200	2.09	
4	01	03	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Terhadap Pembinaan BUMD	%	100	-		-	100	-	-	-	-	N/A	-		-	N/A	
4	01	03	2	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	-	-	-	1	-	-	-	N/A	N/A	-		-	N/A	
4	01	03	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup perekonomian	%	100	162,833,235		325,831,318	100	191,455,809	-	23,247,517	-	12.14%	-		349,078,835	2.14	
4	01	03	2	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	1	162,833,235	1	325,831,318	1	191,455,809	-	23,247,517	-	12.14%	1		349,078,835	2.14	
4	01	03	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase data perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu dan akurat	%	100	-		-	100	-	-	-	-	N/A	-		-	N/A	

4	01	03	2	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kegiatan	Laporan	12	-	-	-	12	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A		
4	01	03	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup administrasi pembangunan	%	100	3,089,772,264		3,245,679,645	100	3,645,770,045	-	209,783,496	-	5.75%	-	3,455,463,141		1.12	
4	01	03	2	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	3	1,577,312,241	3	924,163,013	3	1,854,153,918	-	17,735,334	-	0.96%	3	941,898,347		0.60	
4	01	03	2	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	2	551,380,739	2	608,866,948	2	564,817,293	-	39,291,745	-	6.96%	2	648,158,693		1.18	
4	01	03	2	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	961,079,284	3	1,712,649,684	3	1,226,798,834	-	152,756,417	-	12.45%	3	1,865,406,101		1.94	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	40	-	-	-	40	-	-	-	-	N/A	-	-		N/A	
4	01	03	2	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Penilaian Tingkat Kematangan UKPBJ yang terpenuhi	Variabel	9	-	-	-	9	-	-	-	N/A	N/A	-	-		N/A	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penggunaan PDN Dalam PBJ	%	88.2	-	-	-	87	-	-	-	-	N/A	-	-		N/A	
4	01	03	2	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sosialisasi aturan Pengaturan PDN	Surat Edaran	2	-	-	-	2	-	-	-	N/A	N/A	-	-		N/A	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Sirup	Nilai	8.5	-	-	-	8.1	-	-	-	-	N/A	-	-		N/A	
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan	%	82.2	-	-	-	81	-	-	-	N/A	N/A	-	-		N/A	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Tendering	Nilai	4.95	-	-	-	4.7	-	-	-	-	N/A	-	-		N/A	
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Tender	%	93.2	-	-	-	92	-	-	-	N/A	N/A	-	-		N/A	

4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Katalog	Nilai	2	-	-	2	-	-	-	N/A	-	-	N/A				
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Terelesainya Pengadaan secara e-Katalog	%	50.15	-	-	30	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A			
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Toko Daring	Nilai	1	-	-	1	-	-	-	N/A	-	-	N/A				
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan pada Toko Daring	Paket	1	-	-	1	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A			
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Non E-Tendering/Non E-Purchasing	Nilai	3.2	-	-	2.9	-	-	-	N/A	-	-	N/A				
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Non e-Tender dan Non e-Purchasing di banding RUP	%	58.2	-	-	57	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A			
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Kontrak	Nilai	4.3	-	-	4	-	-	-	N/A	-	-	N/A				
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Kontrak yang Terupload pada Sistem	%	81.2	-	-	80	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A			
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kualifikasi Dan Kompetensi SDM PBJ	Nilai	24.4	-	-	21.2	-	-	-	N/A	-	-	N/A				
4	01	03	2	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM PBJ yang terqualifikasi dan berkompentensi	Orang	65	-	-	54	-	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A			
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	5,212,714,719	5,771,666,999	100	5,176,073,257	-	529,947,149	-	10.24%	-	6,301,614,148	1.21			
4	01	03	2	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	912,256,492	1	851,901,862	1	931,604,612	-	150,018,006	-	16.10%	1	1,001,919,868	1.10		
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4	1,141,761,769	4	1,547,002,926	4	1,329,859,888	-	208,840,469	-	15.70%	4	1,755,843,395	1.54		

4	01	03	2	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	110	3,158,696,458	110	3,372,762,211	110	2,914,608,757	-	171,088,674	-	5.87%	110	3,543,850,885	1.12		
4	01	03	2		Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi, Rumusan Kebijakan serta Pemantauan Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Sumber Daya Alam	%	100	561,191,209		861,934,758	100	674,992,852	-	119,641,476	-	17.72%	-	981,576,234	1.75		
4	01	03	2	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	376,253,060	1	550,390,604	1	440,728,193	-	51,751,884	-	11.74%	1	602,142,488	1.60		
4	01	03	2	02	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	112,146,987	1	187,503,834	1	136,625,184	-	37,884,067	-	27.73%	1	225,387,901	2.01		
4	01	03	2	03	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	72,791,163	1	124,040,320	1	97,639,475	-	30,005,525	-	30.73%	1	154,045,845	2.12		

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Realisasi Anggaran sebesar 19.02% dengan predikat sangat rendah
2. Rata-Rata Tingkat Capaian Anggaran sebesar 16.07% dengan predikat sangat rendah
3. Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Program (Outcome/Indikator Program) sebesar 0% dengan predikat sangat rendah
4. Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Output/ Keluaran Kegiatan) sebesar 13.24% dengan predikat sangat rendah

Berdasarkan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat Daerah triwulan I Tahun 2025 dapat dianalisa bahwa perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor belum mencapai target. Berikut keterangan pada masing-masing program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp128,142,303,113,- terealisasi sebesar Rp22,771,270,850,- atau sebesar 17,77%, dan capaian fisik sebesar 0% dengan rincian capaian per kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp618,047,982,- terealisasi sebesar Rp121,186,014,- atau sebesar 19,61% dengan kinerja fisik sebesar 11.11%.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp58,325,886,303,- terealisasi sebesar Rp12,168,922,438,- atau sebesar 28.57% dengan kinerja fisik sebesar 20,86%.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp58,325,886,303,- terealisasi sebesar Rp0,- atau sebesar 0% dengan kinerja fisik sebesar 0%.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp2,775,198,319,- terealisasi sebesar Rp1,471,011,001,- atau sebesar 53.01% dengan kinerja fisik sebesar 60%.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran untuk jasa pelayanan adm. Umum sebesar Rp 15,527,087,259,- terealisasi sebesar Rp2,773,959,371,- atau sebesar 17.87% dengan kinerja fisik sebesar 9.64% dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp2,558,140,510,- terealisasi sebesar Rp191,598,873,- atau 7.49% dengan kinerja fisik sebesar 16.67%

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp4,556,319,780,- terealisasi sebesar Rp0,- atau sebesar 0% dengan kinerja fisik sebesar 0%
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp13,299,409,301,- terealisasi sebesar Rp2,084,482,567,- atau sebesar 15,67% dengan kinerja fisik sebesar 55%
- h. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp4,556,319,780,- terealisasi sebesar Rp0,- atau sebesar 0% dengan kinerja fisik sebesar 0%
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp6,761,121,851,- terealisasi sebesar Rp131,427,730,- atau sebesar 1.94% dengan kinerja fisik sebesar 4%
- j. Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp9,379,202,050,- terealisasi sebesar Rp1,889,264,662,- atau sebesar 30,67% dengan kinerja fisik sebesar 14.42%
- k. Kegiatan Penataan Organisasi dengan anggaran sebesar Rp1,331,985,409,- terealisasi sebesar Rp12,958,778,- atau sebesar 4.04% dengan kinerja fisik sebesar 0%
- l. Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4,- terealisasi sebesar Rp0,- atau sebesar 0% dengan kinerja fisik sebesar 0%
- m. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan anggaran sebesar Rp7,908,943,710,- terealisasi sebesar Rp970,824,992,- atau sebesar 12,28% dengan kinerja fisik sebesar 0%
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp36,945,731,104,- terealisasi sebesar Rp9,712,877,686,- atau sebesar 26,29% capaian fisik sebesar 0% dengan rincian capaian per kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp1,731,148,203,- terealisasi sebesar Rp Rp417,063,284,- atau sebesar 24,57% dengan kinerja fisik sebesar 0%.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp31,926,104,948,- terealisasi sebesar

Rp8,514,783,085,- atau sebesar 26,67% dengan kinerja fisik sebesar 0%.

- c. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum untuk penyusunan dan pendokumentasian produk hukum dengan anggaran sebesar Rp1,965,291,503,- terealisasi sebesar Rp595,226,567,- atau sebesar 30,29% dengan kinerja fisik sebesar 0,1% dan bantuan hukum dengan anggaran sebesar Rp727,104,825,- terealisasi sebesar Rp105,437,475,- atau sebesar 14,50% dengan kinerja fisik sebesar 0%.
 - d. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah dengan anggaran sebesar Rp596,081,625,- terealisasi sebesar Rp80,367,275,- atau sebesar 13,48% dengan kinerja fisik sebesar 0%.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp10,585,520,163,- terealisasi sebesar Rp926,432,238,- atau sebesar 8,75% capaian fisik sebesar 0% dengan rincian capaian per kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp1,088,684,009,- terealisasi sebesar Rp67,060,117,- atau sebesar 8,6% dengan kinerja fisik sebesar 0%.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp3,645,770,045,- terealisasi sebesar Rp209,783,496,- atau sebesar 5,75% dengan kinerja fisik sebesar 0%.
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp5,176,073,257,- terealisasi sebesar Rp529,947,149,- atau sebesar 10,24% dengan kinerja fisik sebesar %.
 - d. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi, Rumusan Kebijakan serta Pemantauan Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp674,992,852,- terealisasi sebesar Rp119,641,476,- atau sebesar 17.72% dengan kinerja fisik sebesar 0%.

BAB III

Rencana Kerja Dan Pendanaan Sekretariat Daerah

3.1 Rencana Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025

APBD Murni Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari 3 Program, 20 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp175,673,554,380,- dan pada Perubahan Parsial I menjadi Rp.192,783,864,917,- atau bertambah sebesar Rp.17,110,310,537,- guna penyesuaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah baru. Namun, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor sebelumnya telah melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp35,983,324,180- dari APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp175,673,554,380,- pengurangan tersebut berasal dari *adjustment* yang ditetapkan oleh BPKAD.

Penyusunan anggaran perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor berpedoman pada Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 dengan terdapat usulan penambahan sub kegiatan "*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*" pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.1 berikut:

Table 3.1

Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	
					Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)		
					Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran APBD 2025 (Parsial I)	Perubahan Penjabaran APBD 2025 (Parsial II)	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13
4	01							175,673,554,380	192,783,864,917	193,083,864,917	204,955,198,260						202,329,993,269	access terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025	
4	01	01						128,142,303,113	148,527,586,304	148,327,586,304	154,428,969,863	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	77.6	156,525,567,110	access terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
																(vv)	ASN	11,90	access terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
																(vv)	ASN	100	access terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
																(vv)	ASN	Tinggi	access terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
																(vv)	ASN	100	access terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
																(vv)	ASN	100	access terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2					618,047,982	419,013,318	419,032,303	419,013,318	Cibinong	APBD		(vv)	ASN		533,372,731	access terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	01				186,869,148.00	138,606,084.00	138,625,069.00	138,606,084.00	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	6	244,272,873	access terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	02				91,982,900.00	59,879,500.00	59,879,500.00	59,879,500.00	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	61,735,765	access terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	03				31,899,525.00	22,403,975.00	22,403,975.00	22,403,975.00	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	23,098,498	access terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025

4	01	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	50,044,125.00	35,305,725.00	35,305,725.00	35,305,725.00	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	36,400,202	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	34,221,625.00	24,983,800.00	24,983,800.00	24,983,800.00	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	25,758,298	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3	3	108,636,959.00	86,486,859.00	86,486,859.00	86,486,859.00	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	3	89,167,952	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4	59,399,200.00	41,579,375.00	41,579,375.00	41,579,375.00	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	4	42,868,336	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	08	Penyelenggaraan WaliData Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan WaliData Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	1	54,994,500.00	9,768,000.00	9,768,000.00	9,768,000.00	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	10,070,808	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Sekretariat Daerah	%	100	100	100	58,325,886,303	58,278,096,912	58,278,096,912	60,238,983,832	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	60,084,717,916	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	300	224	224	57,794,245,484	57,794,245,484	57,794,245,484	59,755,132,404	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	224	59,585,867,094	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	2	264,431,727	251,159,011	251,159,011	251,159,011	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	2	258,944,940	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	2	2	52,199,065	37,014,515	37,014,515	37,014,515	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	2	38,161,965	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	112,459,359	65,899,393	105,178,059	65,899,393	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	67,942,274	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	16	16	34,719,125	105,178,059	24,600,450	105,178,059	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	16	108,438,579	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	2	67,831,543	24,600,450	65,899,393	24,600,450	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	2	25,363,064	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100 (100)	100 (100)	100 (100)	21,397,415	14,977,896	14,977,896	14,977,896	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100 (100)	15,442,211	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMMD) Sekretariat Daerah	Dokumen	1	1	1	1,383,060	968,142	968,142	968,142	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	998,154	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Laporan	1	1	1	2,650,680	1,855,476	1,855,476	1,855,476	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	1,912,996	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	17,363,675	12,154,278	12,154,278	12,154,278	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	12,531,061	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	100	100	2,775,198,319	2,750,291,891	2,750,291,891	2,750,291,891	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	2,855,281,996	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	12	12	788,627,908	784,768,855	784,768,855	784,768,855	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	12	809,096,690	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	6	6	195,896,011	174,848,636	174,848,636	174,848,636	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	6	200,000,000	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025

4	01	01	2.1	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	280,674,400	280,674,400	280,674,400	280,674,400	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	289,375,306	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Asement Pegawai Lingkup Sekretariat Daerah	Laporan	1	1	1					Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	-	
4	01	01	2.1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	30	30	1,510,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	30	1,556,810,000	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100	100	100	15,527,087,259	35,560,954,679	35,525,130,694	36,459,288,200	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	36,744,497,616	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6	238,813,421	455,741,449	455,741,449	455,741,449	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	6	469,869,434	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	15	15	5,387,278,663	16,851,048,872	16,824,267,848	17,096,637,593	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	15	17,373,431,387	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	2,974,552,674	3,424,144,700	3,415,101,740	3,741,558,500	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	4	3,530,293,186	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	45	45	125,289,571	212,311,199	212,311,199	547,642,199	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	45	218,892,846	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Bulanan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	6,500,028,030	14,405,442,059	14,405,442,058	14,405,442,059	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	12	14,852,010,763	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Digitalisasi Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	1	1	301,124,900	212,266,400	212,266,400	212,266,400	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	300,000,000	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	100	100	2,558,140,510	1,178,370,856	1,178,370,856	1,178,370,856	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	2,550,000,000	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	2,558,140,510	1,178,370,856	1,178,370,856	1,178,370,856	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	12	2,550,000,000	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan dengan baik	%	100	100	100	4,556,319,780	1,713,594,468	1,713,594,468	1,713,594,468	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	1,766,715,897	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	3	3	4,556,319,780	1,713,594,468	1,713,594,468	1,713,594,468	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	3	1,766,715,897	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	13,299,409,301	12,891,888,689	12,897,888,689	12,891,888,689	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	13,391,981,748	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	2	1,986,821,944	1,745,446,644	1,745,446,644	1,745,446,644	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	2	1,900,000,000	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Internet, Layanan Scholar, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	4	5,117,738,056	4,457,736,972	4,457,736,972	4,457,736,972	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	4	4,595,926,818	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1,735,608,677	1,441,583,999	1,441,583,999	1,441,583,999	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	1,486,273,103	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	4	4,459,240,624	5,247,121,074	5,253,121,074	5,247,121,074	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	4	5,409,781,827	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025

4	01	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	6,761,121,851	10,383,319,635	10,383,319,635	13,273,782,753	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	11,945,166,579	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	6	644,370,000	713,890,000	713,890,000	713,890,000	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	6	736,020,590	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	256	256	256	919,500,000	1,144,485,000	1,144,485,000	1,144,485,000	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	256	1,179,964,035	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	5	90,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	5	61,860,000	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	1	5,107,251,851	8,464,944,635	8,464,944,635	11,355,407,753	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	8,727,357,919	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN		1,239,964,035	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Gaji, Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu	%	100	100	100	8,704,202,050	10,879,274,225	10,679,274,225	10,879,274,225	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	11,216,531,726	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	24	24	24	1,581,178,976	1,581,178,976	1,581,178,976	1,581,178,976	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	24	1,630,195,524	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	24	24	24	7,123,023,074	9,298,095,249	9,098,095,249	9,298,095,249	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	24	9,586,336,202	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	435,000,000	601,300,000	601,300,000	601,300,000	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	619,940,300	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	02	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	100	100	435,000,000	601,300,000	601,300,000	601,300,000	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	619,940,300	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Medical Check Up Kepala Daerah yang Dilakukan	%	100	100	100	240,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	247,440,000	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2	240,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	2	247,440,000	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terpenuhi	%	100	100	100	5,079,563,224	5,255,552,066	5,255,552,066	5,255,552,066	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	5,494,069,164	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	12	2,376,735,449	2,376,709,312	2,376,709,312	2,376,709,312	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	12	2,450,387,301	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	12	12	12	1,941,770,140	1,941,743,901	1,941,743,901	1,941,743,901	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	12	2,001,937,962	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	12	761,057,635	937,098,853	937,098,853	937,098,853	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	12	1,041,743,901	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1		Penataan Organisasi	Kategori Penerapan Sistem Kerja Berdasarkan SE Menpan No 15 Tahun 2023	Kategori	6.5	4	4	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	4.5	-	
4	01	01	2.1	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah rancangan Perbup/Kepbup/SE Implementasi Sistem Kerja 2025	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	-	

						Laporan Hasil FGD/Sharing Session	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-		
						Telaahan Staff sebagai bahan perumusan kebijakan Sistem Kerja Tahun 2026	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-		
4	01	01	2.1		Penataan Organisasi	Persentase kematangan kelembagaan PD pada level sangat tinggi	%	85	35	35	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	45	-		
						Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi dan asistensi/konseling kelembagaan	Perangkat Daerah	76	76	76	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	76	-		
						Laporan Hasil Evaluasi Kematangan Kelembagaan kepada PPK dan kepada Kemendagri	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	2	-		
4	01	01	2.1		Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup organisasi	%	100	100	100	425,000,000	258,212,700	204,212,700	258,212,700	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	266,217,294		acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan berupa Keppup/Perbup Kelembagaan)	Dokumen	20	8	20	425,000,000	258,212,700	204,212,700	258,212,700	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	8	266,217,294		acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
						Jumlah Dokumen Kajian dan Naskah Akademik Kelembagaan yang tersusun	Dokumen	2	1	2	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-		
4	01	01	2.1		Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	%	100	100	100	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	-		
4	01	01	2.1	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah fasilitasi kepegawaian yang terpenuhi sesuai kebutuhan manajemen SDM	Kegiatan	3	3	3	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	3	-		
						Jumlah Kebutuhan/Formasi JF yang tersusun sesuai pedoman perhitungan kebutuhan JF	Jenis JF	10	10	10	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	10	-		
						Jumlah Kebutuhan JF yang diusulkan penetapannya ke Kementerian PAN dan RB	Jenis JF	3	3	3	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	3	-		
						Jumlah dokumen laporan pengembangan sistem informasi jabatan yang terintegrasi	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-		
4	01	01	2.1		Penataan Organisasi	Persentase koordinasi, fasilitasi serta sosialisasi tata laksana	%	100	100	100	189,503,650	107,167,775	107,167,775	107,167,775	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	110,489,976		acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah kebijakan berupa Keppup dan SE terkait pengaturan tata laksana secara efektif dan efisien.	Dokumen	5	5	5	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	5	-		
						Rancangan Keppup Peta Bisnis Proses sesuai RPJMD Kabupaten Bogor 2025-2029	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-		
						Jumlah pelaksanaan sosialisasi Tata Laksana	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	3	3	3	189,503,650	107,167,775	107,167,775	107,167,775	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	3	110,489,976		acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025

						Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunannya	Jenis SOP	5	5	5	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	5	-	
						Jumlah SOP PD yang dievaluasi	PD	76	76	76	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	76	-	
						Rumusan Kebijakan Fleksibilitas Kerja	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-	
4	01	01	2.1		Penataan Organisasi	Tingkat Capaian RB Perangkat Daerah minimal Baik	%	7916%	19.44	19.44	207,871,975	117,892,600	117,892,600	117,892,600	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	27.78	121,547,271	acces terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Jumlah Kepbup Renaksi RB)	Dokumen	2	2	2	207,871,975	117,892,600	117,892,600	117,892,600	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	2	121,547,271	acces terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
						Jumlah Capaian Move Implementasi Renaksi RB yang terkoordinasi dan terinput dalam Portal RB Menpan	Kegiatan	4	4	4	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	4	-	
						Jumlah pelaksanaan Roadshow RB	Perangkat Daerah	8	8	8	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	12	-	
						Jumlah Sosialisasi/FGD Mindset Reform Level Pimpinan JPT dan Administrator	Kegiatan	2	2	2	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	2	-	
						Jumlah Koordinasi dan Konsultasi tema keorganisasian melalui "Warung Nas"	Kegiatan	8	8	8	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	4	-	
						Jumlah Sosialisasi/Fasilitasi PD dan Evaluator dalam penilaian RB PD (sosialisasi ke PD 1, pleno kab 2, pleno prop 2)	Kegiatan	5	5	5	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	5	-	
						Dokumen Laporan Sementara dan Keputusan Final Hasil evaluasi RB PD	Dokumen	2	2	2	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	2	-	
											-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN		-	
4	01	01	2.1		Penataan Organisasi	Persentase Koordinasi, fasilitasi serta sosialisasi pelayanan publik	%	100	100	100	213,172,075	127,496,150	127,496,150	127,496,150	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	27.78	131,448,531	acces terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	04	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (PEKPP, KPP dan IKM semester 1 dan 2 /tahunan)	Dokumen	4	4	4	213,172,075	127,496,150	127,496,150	127,496,150	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	4	131,448,531	acces terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
						Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis ZI bagi TPI dan PD Target	Kegiatan	2	2	2	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	2	-	
						Jumlah dokumen laporan pembangunan Zona Integritas	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-	
						Jumlah pelaksanaan sosialisasi Yanlik	Kegiatan	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-	
4	01	01	2.1		Penataan Organisasi	Persentase dokumen peningkatan Kinerja dan implementasi RB yang terselenggara	%	100	100	100	296,437,709	210,885,659	300,885,659	210,885,659	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	217,423,114	acces terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Camat	Dokumen	146	146	146	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	146	-	

						Jumlah Dokumen IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah	Dokumen	73	73	73	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	73	-	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	296,437,709	210,885,659	300,885,659	210,885,659	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	217,423,114	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
						Jumlah pelaksanaan Sosialisasi/ Biretek Akuntabilitas Kinerja kepada PD	Kegiatan	2	2	2	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	2	-	
						Jumlah pedoman penyusunan LKJIP Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	-	
						Dokumen laporan pengembangan aplikasi e SAKIP sesuai kebutuhan	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	-	
						Jumlah pemenuhan data e SAKIP Terintegrasi (perencanaan, persiapan penilaian dan perubahan)	Kegiatan	2	2	2	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	2	-	
4	01	01	2.1		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolkan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi	%	100	100	100	7,908,943,710	7,539,296,785	7,533,101,785	7,690,996,785	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	8,213,283,042	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	01	Fasilitasi Keprotokolkan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolkan	Laporan	1	1	1	5,964,703,835	5,612,459,906	5,536,248,156	5,646,359,906	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	5,786,446,163	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	1	1	399,831,875	307,202,795	335,052,795	341,102,795	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	607,202,795	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	01	2.1	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	12	12	1,544,408,000	1,619,634,084	1,661,800,834	1,703,534,084	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	12	1,819,634,084	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Akun Media Sosial dan Media Online	Laporan	12	12	12	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	12	-	
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	AA	AA	AA	36,945,731,104	34,580,781,028	35,080,781,028	39,901,450,162	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	AA	35,828,988,148	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
						Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100								(vv)	ASN	100		
						Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100								(vv)	ASN	100		
4	01	02	2		Administrasi Tata Pemerintahan	Rata-rata Penerapan SPM Kabupaten Bogor	%	98,50	98,50	98,50	453,284,270	294,761,454	294,761,454	427,461,704	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	98,50	303,899,059	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi dan Pendampingan Penerapan SPM Kabupaten Bogor	Pendampingan	5	5	5	453,284,270	294,761,454	294,761,454	427,461,704	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	5	303,899,059	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Tata Pemerintahan	%	100	100	100	1,277,863,933	783,722,776	783,722,776	797,222,776	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	808,018,182	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	5	5	5	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	5	-	
4	01	02	2	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	3	3	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	3	-	

						Jumlah Kunjungan Kepala Daerah ke Kecamatan	Kunjungan	30	30	30	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	30	-	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Bantuan Infrastruktur Kelurahan	Dokumen	12	12	12	741,123,309	437,670,152	437,670,152	437,670,152	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	12	451,237,927	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	3	3	536,740,624	346,052,624	346,052,624	359,552,624	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	3	356,780,255	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
						Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kapasitas Daerah	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-	
						Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-	
4	01	02	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	31,926,104,948	31,426,647,445	31,926,647,445	36,444,747,445	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	32,400,873,516	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5	5	5	11,576,825,636	10,338,799,366	10,538,799,366	10,804,399,366	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	5	10,659,302,146	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen	6	4	4	17,519,268,193	17,305,445,980	17,305,445,980	18,305,445,980	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	4	17,841,914,805	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2	03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	5	2	2	2,830,011,119	3,782,402,099	4,082,402,099	7,334,902,099	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	5	3,899,656,564	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
						Jumlah Pengkoordinasian Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	4	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	4	-	
						Jumlah Kegiatan Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	3	3	3	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	3	-	
4	01	02	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hibah Keagamaan	%	100	100	100	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	-	
4	01	02	2	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Laporan Penyelenggaraan Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan	Laporan	160	181	181	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	160	-	
4	01	02	2	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Laporan Penyelenggaraan Hibah Lembaga Keagamaan	Laporan	8	10	10	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	8	-	
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tingkat Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi	Poin	>22.5	>22.5	>22.5	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	>22.5	-	
4	01	02	2	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Di Harmonisasi	Dokumen	15	15	15	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	15	-	
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat yang Berkualitas	Poin	>22.5	>22.5	>22.5	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	>22.5	-	
4	01	02	2	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Asn Yang Mendapat Peningkatan Kompetensi Dibidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12	2	2	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	4	-	
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Hasil Reviu	Poin	>27	>27	>27	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	>27	-	

4	01	02	2	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan di Reregulasi dan Deregulasi Sebagai Tindak Lanjut dari Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Dokumen	2	2	2	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	2	-	
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	Poin	>18	>18	>18	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	>18	-	
4	01	02	2	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Jdih Terintegrasi Sesuai Dengan Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum	Dokumen	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-	
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan sesuai Program Pembentukan Peraturan Bupati Peraturan Daerah	%	100	100	100	1,965,291,503	1,282,936,403	1,282,936,403	1,439,305,287	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	1,322,707,431	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	395	395	395	1,315,966,234	847,417,484	847,417,484	847,417,484	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	395	873,687,426	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	395	395	395	649,325,269	435,518,919	435,518,919	591,887,803	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	395	449,020,005	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Perkara yang Ditangani	%	100	100	100	727,104,825	506,396,325	506,396,325	506,396,325	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	678,541,673	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus	35	35	35	727,104,825	506,396,325	506,396,325	506,396,325	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	35	678,541,673	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
						Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan	20	20	20	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	20	-	
						Jumlah Penyuluhan Hukum Aparatur	Penyuluhan	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-	
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Ketercapaian Target Rencana Aksi Nasional HAM	%	100	100	100	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	-	
4	01	02	2	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Penyampaian Bukti Dukung Pemenuhan Rencana Aksi	Bukti Dukung	3	3	3	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	3	-	
4	01	02	2		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Implementasi Kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang diepakati	%	80	80	80	596,081,625	286,316,625	286,316,625	286,316,625	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	80	314,948,288	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	110	110	110	213,362,550	170,597,550	170,597,550	170,597,550	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	110	187,657,305	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2	02	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	12	12	12	82,719,075	65,724,075	65,724,075	65,724,075	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	12	72,296,483	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	02	2	03	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	1	1	300,000,000	49,995,000	49,995,000	49,995,000	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	54,994,500	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Indek Tata Kelola Pengadaan	Poin	84	79	79	10,585,520,163	9,675,497,585	9,675,497,585	10,624,778,235	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	80	9,975,438,010	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
						Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100							(vv)	ASN	100		
						Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100							(vv)	ASN	100		

4	01	03	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang perekonomian	%	100	100	100	642,115,750	1,758,989,200	1,758,989,200	1,758,989,200	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	1,813,517,865	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2	01	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	1	1	642,115,750	1,758,989,200	1,758,989,200	1,758,989,200	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	1,813,517,865	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	01	03	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Terhadap Pembinaan BUMD	%	100	100	100	255,112,450	167,848,300	167,848,300	167,848,300	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	-	
4	01	03	2	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	1	1	255,112,450	167,848,300	167,848,300	167,848,300	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	-	
4	01	03	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup perekonomian	%	100	100	100	191,455,809	139,781,509	139,781,509	139,781,509	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	144,114,736	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	1	1	1	191,455,809	139,781,509	139,781,509	139,781,509	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	1	144,114,736	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersedianya data perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu dan akurat	%	100	100	100	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	-	
4	01	03	2	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kegiatan	Laporan	12	12	12	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	12	-	
4	01	03	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup administrasi pembangunan	%	100	100	100	3,645,770,045	2,652,364,117	2,652,364,117	3,357,638,767	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	100	2,734,587,405	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3	3	1,854,153,918	1,354,017,718	1,354,017,718	1,354,017,718	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	3	1,395,992,267	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	2	2	2	564,817,293	473,323,715	473,323,715	473,323,715	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	2	487,996,750	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	3	3	1,226,798,834	825,022,684	825,022,684	1,530,297,334	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	3	850,598,387	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	40	40	40	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	40	-	
4	01	03	2	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Penilaian Tingkat Kematangan UKPBJ yang terpenuhi	Variabel	9	9	9	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	9	-	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penggunaan PDN Dalam PBJ	%	88.2	87	87	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	87	-	
4	01	03	2	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sosialisasi aturan Pengaturan PDN	Surat Edaran	2	2	2	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	2	-	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Sirup	Nilai	8.5	8.1	8.1	-	-	-	-	Cibinong	APBD		(vv)	ASN	8.2	-	

4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan	%	82.2	81	81	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	82	-	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Tendering	Nilai	4.95	4.7	4.7	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	4.7	-	
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Tender	%	93.2	92	92	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	93	-	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Katalog	Nilai	2	2	2	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	2	-	
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Tereleasaikannya Pengadaan secara e-Katalog	%	50.15	30	30	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	30	-	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Toko Daring	Nilai	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-	
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan pada Toko Daring	Paket	1	1	1	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	-	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Non E-Tendering/Non E-Purchasing	Nilai	3.2	2.9	2.9	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	3	-	
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Non e-Tender dan Non e-Purchasing di banding RUP	%	58.2	57	57	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	58	-	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Kontrak	Nilai	4.3	4	4	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	4.1	-	
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Kontrak yang Terupload pada Sistem	%	81.2	80	80	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	81	-	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kualifikasi Dan Kompetensi SDM PBJ	Nilai	24.4	21.2	21.2	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	22.4	-	
4	01	03	2	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM PBJ yang terqualifikasi dan berkompentensi	Orang	65	54	54	-	-	-	-	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	54	-	
4	01	03	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	5,176,073,257	4,474,769,107	4,474,769,107	4,474,769,107	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	4,613,486,949	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	1	1	931,604,612	783,111,562	783,111,562	783,111,562	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	807,388,020	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4	4	4	1,329,859,888	980,126,588	980,126,588	980,126,588	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	4	1,010,510,512	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	110	110	110	2,914,608,757	2,711,530,957	2,711,530,957	2,711,530,957	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	110	2,795,588,417	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2		Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi, Rumusan Kebijakan serta Pemantauan Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Sumber Daya Alam	%	100	100	100	674,992,852	481,745,352	481,745,352	725,751,352	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	100	496,679,458	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	1	440,728,193	322,988,243	322,988,243	543,299,243	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	333,000,879	acres terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025

4	01	03	2	02	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	1	1	136,625,184	96,270,734	96,270,734	111,810,734	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	99,255,127	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025
4	01	03	2	03	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	1	1	97,639,475	62,486,375	62,486,375	70,641,375	Cibinong	APBD	(vv)	ASN	1	64,423,453	acress terhadap Pagu Anggaran Tahun 2025

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 telah disusun dengan memedomani substansi Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025, yang merupakan penyesuaian terhadap visi misi Kepala Daerah yang baru. Dalam proses penyusunannya, perhatian utama difokuskan pada kontribusi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam dokumen Perubahan Renja ini diarahkan untuk selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, guna menjamin kesinambungan dan konsistensi pencapaian target pembangunan.

Selanjutnya, guna menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, dokumen Perubahan Renja ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Proses ini akan berlanjut hingga penetapan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025, sehingga seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran dapat berjalan secara terpadu dan efektif.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR

